

Praktik Politik Uang dalam Pemilu Menciderai Nilai-Nilai Demokrasi

Rurin Fatonah

rurinfatonah@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan praktik politik uang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat menjelang pemilu. Politik uang merupakan cara dalam mempengaruhi masyarakat untuk memilih pemimpinnya dengan cara yang bertentangan dengan konstitusi. Maraknya praktik politik uang hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia dan sudah membudaya. Paham demokrasi di negeri ini nampaknya tidak begitu kuat dalam membendung praktik politik uang di masyarakat. Ketidaktahuan akan pendidikan politik menyebabkan masyarakat dengan mudah dipengaruhi hak-hak konstitusionalnya dalam berdemokrasi. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana berdasarkan realitas secara alamiah dan menggambarkan kondisi sebenarnya serta studi pustaka terkait berdasarkan literasi yang relevan. Hasil penulisan menunjukkan bahwasanya terdapat beberapa alasan mengapa praktik politik uang sulit dihilangkan pada kehidupan masyarakat serta dipaparkan juga solusi yang mungkin bisa digunakan untuk meminimalisir praktik politik uang yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut Bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Politik uang, pemilu, demokrasi

ABSTRACT

The purpose of this paper is to describe the practices of money politics that occur in people's lives ahead of the election. Money politics is a way of influencing people to choose their leaders in ways that conflict with the constitution. The rise of the practice of money politics almost occurs in every region in Indonesia and has become entrenched. Understanding of democracy in this country seems not so strong in stemming the practice of money politics in society. Ignorance of political education causes people to be easily influenced by their constitutional rights in democracy. The writing method used is a qualitative descriptive method which is based on reality naturally and describes the actual conditions and related literature studies based on relevant literacy. The results of the writing show that there are several reasons why the practice of money politics is difficult to eliminate in people's lives and also presented solutions that might be used to minimize the practice of money politics that are contrary to the democratic values adopted by the Indonesian Nation.

Keywords: Money politics, elections, democracy

PENDAHULUAN

Menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ditegaskan bahwasanya pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Dan dalam menyelenggarakan pemilu penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud dan penyelenggarannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

Pemilu merupakan arena kontestasi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Di Indonesia sendiri pemilu pertama kali dilaksanakan pada periode 1945-1959 dimana identic dengan demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan hingga demokrasi pada periode 1998 sampai sekarang yang dengan adanya kebebasan pers sehingga mempengaruhi dinamika perkembangan kehidupan politik bangsa dan negara. Pemilu dianggap penting karena pemilu menjadi mekanisme bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan dan pemilu menjadi indicator negara demokrasi, bahkan tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu. Nilai-nilai demokratis untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis yakni kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya, kerjasama, pertumbuhan ekonomi, pluralism, serta hubungan yang seimbang antara negara dengan masyarakat. Nilai-nilai yang demikian itulah yang diharapkan dapat tertanam pada diri tiap warga negara Indonesia didalam menyalurkan partisipasi politiknya guna keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Idealnya memang pemilu harus dilaksanakan menurut UU yang berlaku serta mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Politik uang adalah suatu usaha untuk mendorong atau mempengaruhi pilihan seseorang dengan menggunakan imbalan berupa uang atau materi. Menurut Yusril Ihza Mahendra, politik uang adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Salah satu bentuk praktik politik uang adalah pemberian uang secara langsung kepada pemilih saat kampanye. Bisa juga berupa pemberian sembako, alat-alat ibadah dan barang-barang lain yang diambil-ambil pesan-pesan politik dari peserta pemilu.

Kriteria nilai-nilai demokrasi menurut Robert A. Dahl yakni persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan kolektif; pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendeklasifikasi kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Dengan kata lain keterlibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan, adanya pengawasan kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur penegak demokrasi.

Namun pada kenyataannya, praktik penyelenggaraan pemilu 2019 di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya masih banyak terdapat celah-celah persoalan yang melingkupi penyelenggaraannya salah satunya politik uang (money politic). Berdasarkan data Bawaslu mengungkapkan 25 politik uang sepanjang masa tenang pemilu 2019. Kasus itu terjaring dalam operasi patroli pengawasan. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan operasi itu dilakukan bekerja sama dengan kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyebutkan bahwa di 25 kasus itu tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Dengan tangkapan terbanyak di Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan jumlah lima kasus. Afif menyebut deretan kasus itu merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT). Sebanyak 22 kasus hasil OTT pengawas pemilu dan 3 kasus OTT kepolisian. Ia juga menyebut beberapa kasus menyita perhatian, seperti di Tiga Binanga, Karo, Sumatera Utara yang barang buktinya berupa uang Rp190 juta. Begitu juga dengan netralitas penyelenggara di Tapin, Kalimantan Selatan. Berdasarkan data kepolisian, kasus politik uang tersebut terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Antara lain Semarang, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Karimun, Kota Gorontalo, Gorontalo Utara, Cianjur, Kota Singkawang, Boyolali, Bantul, Pohuwato, Nusa Tenggara Barat, Selain itu, juga ditemukan terjadi di Fakfak, Halmahera Tengah, Belitung Timur, Poso, Bulungan, Pasaman Barat, Bener Meriah, Tidore, Bau-Bau, Kota Palu, Kota Bekasi, Bulukumba, Kupang, Bone Bolango, Sumbawa dan Maluku Tenggara Barat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis membuat rumusan masalah yakni bagaimana upaya pencegahan praktik politik uang di masyarakat agar supaya tidak menciderai nilai-nilai demokrasi?. Kemudian tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui upaya dan solusi pencegahan praktik politik uang di masyarakat agar supaya tidak menciderai nilai-nilai demokrasi.

METODE

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana berdasarkan realitas secara alamiah dan menggambarkan kondisi sebenarnya serta studi pustaka terkait berdasarkan literasi yang relevan. Instrumen penelitian menggunakan angket dan lembar pengamatan dengan indicator pertanyaan sesuai fenomena yang terjadi di masyarakat secara langsung. Analisis pemecahan masalah berdasarkan pendekatan langsung secara personal dengan obyek penelitian di lapangan.

HASIL

Politik uang banyak digunakan oleh peserta pemilu dengan dana yang besar namun memiliki elektabilitas yang rendah serta minim gagasan. Karenanya, memberi suara pemilih lewat praktik politik uang adalah jalan pintas yang ditempuh oleh mereka demi mendapatkan suara yang tinggi tanpa susah payah 'menjual' program dan gagasan kepada calon pemilih. Segmen calon pemilih yang rawan menjadi sasaran politik uang adalah pemilih dengan status menengah kebawah baik secara ekonomi maupun pendidikan. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Pemilih dengan status pendidikan dan ekonomi menengah kebawah cenderung tidak memilih calon berdasarkan gagasannya dalam membangun daerah. Mereka pun secara ekonomi serba kekurangan, oleh karena itu, dalam memilih calon mereka cenderung *money oriented* atau lebih berorientasi kepada berapa banyak uang yang sanggup diberikan oleh calon meskipun uang pemberian calon tersebut tentu tidak sebanding dengan jabatan selama lima tahun ke depan yang bersinggungan langsung dengan kebijakan-kebijakan politik di daerah.

Kurang sadarnya masyarakat Indonesia akan budaya politik yang baik juga merupakan salah satu pendorong masih banyaknya kasus politik uang dalam pemilu. Masyarakat cenderung pasif akan adanya kontestasi politik dan merasa pesimis akibat tidak adanya calon yang dianggap memiliki kapabilitas untuk memanggul jabatan publik. Tingkat pendidikan juga sangat

mempengaruhi daya kritis masyarakat dalam memilih seorang kepala daerah dan anggota legislatif. Calon-calon kepala daerah dan legislatif yang minim gagasan pun bisa jadi akan terpilih karena masyarakat tidak kritis akan figur yang menjadi calon. Terlebih lagi, masalah perekonomian yang dari tahun ke tahun masih terus membelenggu kehidupan membuat masyarakat merasa bahwa siapapun yang menjabat tidak akan membawa perubahan apapun dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu masyarakat sangat mudah sekali terpengaruh dan memilih calon hanya berdasarkan siapa yang mampu memberikan mereka uang lebih banyak saat kampanye. Sikap-sikap politik yang pragmatis seperti inilah yang semakin menumbuh suburkan budaya politik uang di masyarakat sehingga masyarakat menganggap bahwa politik uang adalah hal yang wajar dan seakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap adanya pemilu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dosen DPP Fisipol UGM Mada Sukmajati ada tiga faktor kenapa politik uang bisa terjadi yakni *Pertama*, faktor politik. Politik uang terjadi karena calon legislatif (caleg) tidak memiliki program tetapi ingin menang. Sementara, partai politik yang mengusung tidak berperan banyak selain membantu pencalonan. *Kedua*, faktor hukum. Menurut Mada, lemahnya regulasi pada pemilu tahun ini menjadi sebuah kemunduran jika dibandingkan dengan pilkada. Ia membandingkan salah satu poin, pada pilkada, pemberi dan penerima terkait politik uang sama-sama mendapat sanksi. *Ketiga*, faktor budaya. Ada kebiasaan yang sudah membudaya di Indonesia, yakni tidak pantas jika menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian. Instrumen kultural ini dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan politik uang.

Dilansir pada sumber harian kompas, Koordinator Nasional Seknas JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat) Alwan Ola Riantoby, mengungkapkan hal tersebut perihal temuan 35 kasus dugaan praktik politik uang di 11 provinsi selama masa tenang pada 14-16 April 2019. Misalnya, di wilayah Bengkulu, JPPR menemukan praktik politik uang dengan nominal terbesar yaitu Rp 200.000. Praktik itu terjadi di Kota Manna, Bengkulu Selatan. Temuan praktik serupa paling banyak di Jawa Timur. Jumlah uang yang diberikan berkisar Rp 20.000 sampai Rp 100.000. Selain uang, pemilih juga diberikan stiker, kalender, dan kaos. Untuk Sulawesi Barat, uang yang beredar sekitar Rp 100.000 hingga Rp 150.000. Bahkan, ada pula yang memberikan barang berupa rebana kepada warga. Selain itu, JPPR juga menemukan praktik politik uang di

Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara.

Politik uang dalam penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah tindakan yang sangat mencederai nilai-nilai demokrasi yang coba dibangun berdasarkan semangat reformasi. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak atas kronisnya permasalahan ini. Banyak hal yang dapat menjadi faktor mengapa praktik politik uang masih terus terjadi baik itu karena longgaranya aturan maupun kesadaran masyarakat akan budaya politik yang baik. Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang sebenar-benarnya. Yaitu pesta demokrasi yang para pemilihnya memiliki kesadaran politik, kebebasan bersuara dan dapat melahirkan sosok pemimpin yang tidak hanya amanah dalam menjalankan mandat rakyat namun juga pemimpin yang bersih dari korupsi. Oleh karena itu, kecerdasan masyarakat dalam pemilu sangat diperlukan karena imbas dari pemilihan kepala daerah ini akan kembali lagi ke masyarakat melalui kebijakan yang dibuat oleh pejabat terpilih. Perlu ada perbaikan dalam demokrasi di Indonesia khususnya pemilu yang lebih ketat secara pengawasan sehingga pemilu dapat berjalan baik dan terhindar dari segala bentuk politik uang dan kecurangan-kecurangan lainnya.

Kemudian solusi atau upaya penanganan yang bisa penulis tawarkan yakni praktik politik uang bisa dilawan dengan solusi jangka panjang dan jangka pendek. Solusi jangka panjang yang dimaksud seperti strategi budaya atau memasukkan materi politik uang ke sub materi antikorupsi dalam kurikulum sekolah. Selain itu, kita juga harus dapat mengedukasi masyarakat agar sadar terhadap politik dalam konteks ini adalah menyadarkan masyarakat pentingnya untuk memilih calon pemimpin dan wakil yang jujur. Menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah serta partai politik dan elemen-elemen lainnya untuk mengedukasi dan menyadarkan masyarakat agar mampu memilih pemimpin secara rasional dan meninggalkan segala bentuk politik uang dan kecurangan-kecurangan lainnya dalam pemilu.

SIMPULAN

Politik uang dalam penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah tindakan yang sangat mencederai nilai-nilai demokrasi. Politik uang nampaknya sudah menjadi tradisi dan budaya di kalangan masyarakat menjelang pemilu. Hal ini mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat akan arti penting demokrasi. Terdapat beberapa alasan politik uang sulit dihilangkan dalam kehidupan komponen masyarakat. Selain faktor budaya dan ekonomi, regulasi atau

peraturan yang kurang tegas menyebabkan semakin tidak terbendungnya persebaran praktik politik uang. Praktik politik uang bisa dilawan dengan solusi jangka panjang dan jangka pendek. Solusi jangka panjang yang dimaksud seperti strategi budaya atau memasukkan materi politik uang ke sub materi antikorupsi dalam kurikulum sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Puspita, O. W., Andayani, Waluyo, H. J., & Rohmadi, M. (2019). The Effectiveness of Poetry Appreciation Textbook for Character Education Implementation at Higher Education. International Journal of Instruction, 12(1), 685-700. <https://doi.org/10.29333/iji.2019.12144a>

David McMenemy(&) and Steven Buchanan. Character Building in Children's Online Information Behaviours: Applying a Virtue Epistemology Perspective to Information LiteracySpringer Nature Switzerland AG 2019 S. Kurbanoglu et al. (Eds.): ECIL 2018, CCIS 989, pp. 73–82, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13472-3_7

Matthew Grizzard, Kaitlin Fitzgerald, C. Joseph Francemone, Changhyun Ahn, Jialing Huang, Jess Walton, Cass McAllister & Allison Eden (2019): Validating the extended character morality questionnaire, Media Psychology, DOI: 10.1080/15213269.2019.1572523.

Politics, Goverment and Research. Kumpulan Hasil Penelitian Politik Uang di Indonesia. UGM, Jogjakarta. 2016

Afan Gaffar, 2015, Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ismawan, Indra, Money Politics : Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Media Pressindo, Yogyakarta, 2015.

Sri Wahyu Aningsih, Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2014, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 4

<https://www.kompasiana.com/dimas92754/5c59de0dab12ae0ab22eedc4/politik-uang-dalam-pemilu-dan-masalah-mental-bangsa-kita?page=all>. Diakses tanggal 21 Mei 2019

<https://www.liputan6.com/regional/read/3942482/4-alasan-politik-uang-sulit-hilang-di-indonesia>. Diakses tanggal 21 Mei 2019.

Lukmajati,Denny.2016. praktik politik uang dalam pemilu legislatif 2014. Politik, vol 7(1)

Rusham.2015. faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya money politics. Paradigma vol.XXI(1)

Iza Rumestan, Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung,, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2 Mei 2014. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 352

Janpatar Simamora, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 229.

Lukmajati,Denny.2016. praktik politik uang dalam pemilu legislatif 2014. Politik, vol 7(1)

Rusham.2015. faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya money politics. Paradigma vol.XXI(1)